

Komunikasi diplomasi pemerintah Indonesia dalam gugatan uni eropa mengenai pemberhentian ekspor bijih nikel

Shila Yuli Pratiwi*, Mey Luvita, Denik Iswardani

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

*Email: 2071600205@student.budiluhur.ac.id

Diterima: 30 April 2022; Direvisi: 25 April 2023; Terbit: 29 April 2023

Abstract

The ban on exports of nickel ore resulting in the European Union's lawsuit to the WTO becomes interesting to investigate, as it relates to international-scale communication processes involving more than one country, and when the communication process is not good it can trigger conflict between countries, therefore a good diplomatic communication process needs to be carried out. The study aims to see how the diplomatic communication process carried out by the Indonesian government in the European Union's lawsuit to the WTO is related to the ban on exports of nickel ore. In this study using a qualitative approach as well as its data collection method is supported by primary and secondary data. Based on the results of research that has been carried out, the Government of Indonesia inining the policy of prohibition of export of nickel ore through 2 communication lines. The first route of diplomacy is multilateral diplomatic communication related to the ban on the export of nickel ore, and the second route is through the World Trade Organization (WTO) has a very important role in the resolution of international trade conflict, in this case the Government of Indonesia diplomatic matters related to policies made by Indonesia as well as claims from the European Union lawsuit, where the government of Indonesia remains open to all countries in need of nikel but for its industry and technology can be sent to Indonesia, so that the nikel exported is a semi-finished material or even a material that is already made and not purely from nikel ore.

Keywords: *Communication; diplomacy; european union; WTO.*

Abstrak

Larangan ekspor bijih nikel yang berujung pada gugatan Uni Eropa ke WTO menjadi sangat menarik untuk ditelaah, karena hal ini berkaitan dengan proses komunikasi berskala internasional melibatkan lebih dari satu negara, dan apabila proses komunikasi tidak baik maka dapat memicu konflik antar negara, oleh karena itu proses komunikasi diplomasi yang baik perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana komunikasi diplomasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam gugatan Uni Eropa ke WTO terkait dengan larangan ekspor bijih nikel. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta metode pengumpulan data didukung dengan data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yaitu melalui 2 jalur komunikasi. Jalur komunikasi pertama diplomasi dilakukan yaitu komunikasi diplomasi multilateral terkait dengan larangan ekspor bijih nikel, dan jalur kedua yaitu melalui *World Trade Organization (WTO)* memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik perdagangan internasional, dalam hal ini pemerintah Indonesia mendiplomasikan hal-hal yang terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh Indonesia serta sanggahan dari gugatan Uni Eropa, dimana Pemerintah Indonesia tetap terbuka terhadap semua negara yang membutuhkan nikel namun untuk industri serta teknologi nya dapat dikirim ke Indonesia, sehingga nikel yang diekspor adalah bahan setengah jadi atau bahkan bahan yang sudah jadi dan bukan murni dari bijih nikel.

Kata-kata kunci: *Komunikasi; diplomasi; gugatan uni eropa; WTO.*

Pendahuluan

Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah tentunya harus dapat dimanfaatkan dengan baik. Tak hanya membicarakan mengenai pemanfaatannya saja, namun nilai dari pemanfaatannya juga tetap harus diperhatikan karena Indonesia akhir-akhir ini mulai banyak disoroti terkait sumberdaya alam yang dimilikinya terutama pada saat mulai berkembangnya dunia perindustrian yang memerlukan nikel sebagai bahan utamanya. Salah satu kekayaan sumber daya alam yang menjadi pusat perhatian dari Global adalah salah satunya nikel. Pada era globalisasi tentunya Nikel dapat dimanfaatkan menjadi salah satu bahan yang digunakan dalam baterai untuk berbagai perangkat seperti kendaraan listrik, yang dimana menjadi sesuatu yang baru dan banyak diikuti oleh orang-orang. Nikel sendiri dipandang sebagai sebuah tembaga yang sangat elastis, karena sifatnya yang seperti itu dapat dibentuk dengan mudah sesuai dengan keperluannya. Meskipun nikel dinilai memiliki sifat yang lentur namun nikel sendiri cukup kuat dan kokoh. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pun memiliki nilai manfaat yang sangat besar, karena nikel sendiri biasanya digunakan dalam bahan campuran proses pembentukan *stainless steel*. Peralatan rumah tangga yang berbahankah ini, biasanya menggunakan bijih nikel karena sifatnya yang kuat terhadap korosi, sehingga bijih nikel pun sangat dicari dan diburu oleh berbagai negara. Bahkan di Indonesia sendiri pernah membuat mata uang koin dari bijih nikel yang telah diolah, uang koin yang dimaksud adalah uang koin pecahan 1000 rupiah. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki sumber daya bahan nikel terbesar di seluruh dunia. Berlandaskan data yang diambil dari US Geological Survey pada tahun 2020, total jumlah cadangan bijih nikel yang dimiliki Indonesia mencapai 72 ton (Alfian & Susanti, 2023). Maka dari itu nikel yang dikeluarkan dari Indonesia sangat dilirik juga dikenal luas oleh pasar dari belahan penjuru negara terutama negara-negara yang mulai banyak membuat peralatan industri dengan bahan ini. Pemerintah di Indonesia sendiri selalu berupaya mengoptimalkan kontribusi Nikel terhadap perekonomian dan kepentingan nasional. Ini termasuk pembatasan ekspor nikel kepada negara lain.

Nama nikel itu sendiri berawal dari bahasa Saxony, Jerman, yaitu *Kupfernickel*, atau jika diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu "tembaga setan" (*Devils copper*) yang sangat terkenal. Pada 1700, pekerja yang di pertambangan Saxony menemukan sebuah elemen yang tidak lazim seperti yang biasa digunakan pada umumnya, elemen tersebut memiliki warnanya sangat mengkilap serta cenderung agak terang dari pada tembaga pada umumnya yang biasa ditemui. Namun, tidak seperti tembaga, setelah diolah elemen ini yang jarang ditemukan ini memiliki karakter yang unik warna nya berubah menjadi perak. Selain itu, elemen ini memiliki

sifat lebih keras dan kuat dibanding dengan tembaga. Elemen dengan karakteristik unik ini akhirnya berhasil diidentifikasi oleh seorang ahli mineral, Baron Axel Fredrik Cronstedt, yang menemukan sebuah mineral bernama niccolite yang ditemukan di area tambang di Swedia. Nikel adalah unsur logam yang terbentuk secara alami dan memiliki ciri mengkilap serta berwarna putih keperak-perakan (Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, 2018). Dengan simpanan juga proses pembuatan beberapa jenis mineral di bumi pertiwi termasuk 10 besar dunia, pemerintah Indonesia ingin mempertahankan nilai penanaman modal sebesar 21,28 miliar dolar AS dengan meningkatkan nilai mineral.

Arifin Tasrif memberikan penuturan nikel, menjadi sebuah mineral yang sangat diminati di Indonesia, menarik bagi industri pertambangan. Nikel menempati urutan pertama di dunia dalam hal total cadangan dan produksi. Arifin juga menunjukkan bahwa, Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), cadangan nikel kita adalah yang pertama di dunia, dan 23% cadangan nikel dunia ada di tanah Indonesia. Arifin menambahkan, Indonesia juga menempati urutan pertama di dunia untuk produksi nikel. Lalu ada bauksit yang menempati urutan keenam dunia dalam hal cadangan dan produksi. Pemerintah berencana membangun 17 smelter dengan menghabiskan nilai investasi sebesar US\$8 miliar dan mengoperasikan sebanyak 30 smelter. Pemerintah berencana membuka 53 smelter di Indonesia pada 2023. Setelah itu, pihaknya berencana menarik investasi sebesar 21,28 miliar dolar AS. Tentu karena tahun 2023 merupakan batas akhir penerbitan izin ekspor konsentrat (Silaban, 2021)

Pada 22 November 2019, Uni Eropa meminta konsultasi dengan Badan Penyelesaian Konflik Indonesia (DSU) sehubungan dengan interupsi terhadap keputusan yang diambil oleh Indonesia tentang mengenai beberapa langkah yang berkenaan mengenai bahan baku khusus yang dimanfaatkan dalam membuat baja tahan karat. Proses tersebut mencakup kebijakan Indonesia tentang pembatasan ekspor nikel, termasuk persyaratan tambahan yang dikenakan selama larangan ekspor yang sebenarnya dan pelanggaran sebagian dari larangan tersebut (M. T. Maulana, 2020).

Indonesia memberlakukan langkah-langkah untuk membatasi ekspor bahan baku yang terkait dengan produksi baja nirkarat. (2) Pasal 3.1b) ASCM ("Industri") di bawah sistem khusus yang diperkenalkan oleh Indonesia untuk pembebasan pajak impor sehubungan dengan promosi pembangunan industri dan investasi dan / atau promosi pembangunan ekonomi di wilayah tertentu negara. "Pengembangan" area "atau" WPI ". Hal ini memungkinkan untuk periode layanan tambahan (diperpanjang), dengan pengecualian penggunaan mesin, sistem, peralatan, atau peralatan yang diproduksi secara lokal. Ketika

dukungan tambahan merupakan subsidi dalam pengertian Pasal 1.1 ASCM dan, bertentangan dengan Pasal 3.1 b) ASCM, membuat subsidi bergantung pada penggunaan produk dalam negeri dibandingkan dengan produk impor. (3) Pasal X:1 PUTP 1994 merupakan cara bagi Indonesia agar pemerintah dan pedagang saling mengenal, dan segala tindakan yang bersifat umum yang berkaitan dengan penerapan pembatasan ekspor dan penerbitan izin ekspor tidak segera diumumkan. (4) Berbagai tindakan yang disebutkan dalam aplikasi ini mengenai bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi baja tahan karat melemahkan atau mengurangi manfaat yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari UE berdasarkan perjanjian yang berlaku. UE berhak untuk menangani proses dan klaim lain selain syarat dan ketentuan yang dibuat selama konsultasi sehubungan dengan masalah di atas (M. T. Maulana, 2020). Larangan Indonesia terhadap ekspor mineral dan batubara telah menimbulkan banyak kontroversi dalam perdagangan multilateral. Hal ini sangat berpengaruh terhadap proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap komunikasi internasional yang dilakukan, apalagi dengan adanya Uni Eropa yang tidak setuju oleh larangan ekspor bijih nikel. Selain itu Sari (2022) menjelaskan bahwa pelarangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia hanya berdampak pada beberapa hubungan politik. Relasi politik terkait sentimen negatif Uni Eropa terhadap Indonesia karena terkesan mempermainkan harga nikel di pasar global. Selain itu, kebijakan larangan ekspor ini juga menghambat negosiasi CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa.

Stevenson menjelaskan bahwa Komunikasi Internasional memiliki pengertian “*it’s hard to define, but you know it when you see it*” (Wahyu & Siahaan, 2021). Komunikasi Internasional dapat dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit yaitu proses terjadinya sebuah pertukaran pesan dari sebuah negara ke negara lainnya. Sementara dalam arti luas komunikasi internasional itu sendiri dapat diartikan proses terjadinya sebuah pertukaran pesan yang dilakukan oleh berbagai aktor baik negara maupun non negara untuk saling memberikan pengaruh dalam mencapai dampak yang diharapkan (Malik, 2017). Maletzke dalam restiawan memaparkan bahwa komunikasi internasional merupakan sebuah proses komunikasi antar berbagai negara atau bangsa melintasi batas-batas negara, biasa pada komunikasi internasional lebih menekankan kepada kajian atau perhatian pada pesan yang memiliki konten kebijakan dan kepentingan suatu negara terhadap negara lainnya (Permana, 2020).

Melakukan sebuah komunikasi dengan khalayak atau target sasaran yang dituju bukanlah sebuah hal mudah untuk dilakukan. Willbur Schram menjelaskan bahwa menjalankan proses komunikasi dengan orang banyak tidaklah sesederhana sebagaimana

model yang dikemukakan oleh Shanon dan Weaver karena proses komunikasi ini sangat kompleks (Morissan, 2007, p. 43), apalagi dalam proses komunikasi internasional yang melibatkan banyak negara. Hamied Maulana (H. Maulana, 1997) dalam praktiknya proses komunikasi Internasional terbagi menjadi 4 yang pertama adalah pendekatan secara *idealistic-humanistic approach* mendeskripsikan komunikasi internasional menjadi suatu alat dalam membawa sebuah negeri dalam berdaulat, guna membantu organisasi internasional. Dalam hal ini setiap bagian negara yang terlibat dapat menciptakan komunikasi yang baik dalam mencapai keadaan dunia yang damai. Kedua, pendekatan dengan cara memandang sebuah komunikasi internasional sebagai alat untuk propaganda, dan konfrontasi atau dapat dikatakan juga sebagai "*political proselytization*" jenis komunikasi ini memiliki sifat satu arah. Ketiga, proses bertumbuhnya sebuah pendekatan komunikasi internasional sebagai *economic power*. Hubungan berbagai negara dibantu melalui proses perdagangan. Ke empat, pendekatan ini melihat komunikasi internasional sebagai kekuasaan politik. Dalam proses komunikasi internasional ini pun berpengaruh terhadap pengambil keputusan yang dilakukan oleh sebuah negara.

Pengambilan keputusan pelarangan impor bijih bahan baku mentah nikel ini dilihat menjadi sebuah keputusan yang tidak berimbang (tidak adil) dan berdampak tidak baik bagi industri baja Eropa karena terbatasnya akses terhadap bijih nikel dan mineral lainnya seperti bijih besi dan kromium. Analisa input maupun output dari kebijakan ini memperlihatkan bahwa langkah kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan pembatasan ekspor adalah tepat (Tui & Adachi, 2021). Ari Seno (2022) menerangkan bahwa kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel mentah, menghasilkan penurunan produktivitas pada sektor tambang nikel mentah di RI. Kebijakan pembatasan ini tidak membuahkan hasil perubahan yang relatif besar, karena perubahannya hanya berkisar 0,42% hingga 0,11%. Uni Eropa dalam tuntutanannya, memiliki pendapat bahwa negeri bumi pertiwi jelas menabrak Pasal 11(1) GATT 1994, dimana adanya pelanggaran kewajiban anggota WTO untuk menyerahkan akses sejauh mungkin terhadap perdagangan internasional, termasuk bahan baku nikel. Pada akhirnya Uni Eropa yang menjadi konsumen besar bijih nikel dunia mengajukan gugatan ke WTO atas Indonesia agar menarik kembali pengambilan keputusan kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah. Presiden Indonesia memberikan pernyataan bahwa kebijakan pelarangan merupakan hak dari Indonesia terhadap sumber daya alam yang dimilikinya (Dewi, 2022). Diplomasi pada awalnya berasal dari kata Yunani *Diploun/Diploma*. Ini berarti sesuatu seperti duplikasi. Diplomasi sendiri dapat diartikan sebagai perpaduan keterampilan dan

pengetahuan negosiasi yang digunakan untuk memperjelas tujuan dan sasaran dalam pertemuan formal yang diwakili oleh perwakilan negara. Diplomasi adalah praktik hubungan internasional antar negara melalui perwakilan resmi, yang mencakup semua keputusan dan komunikasi luar negeri. Selain itu diplomasi menjadi sebuah kunci melaksanakan proses komunikasi dan negosiasi suatu bangsa dengan bangsa lainnya untuk mendapatkan bantuan skala internasional (Saefudin, 2008). Diplomasi juga merupakan upaya untuk membuat negara lain dan partai politik memahami posisi dan membenarkan persepsi negara tanpa kekerasan. Diplomasi, menjadi sebuah alat terpenting yang dimanfaatkan oleh negara untuk menjalankan sebuah politik luar negeri. Tujuan diplomasi nasional adalah untuk memastikan integritas politik dan teritorial dan untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasional. (Sundari et al., 2021).

Dilaksanakannya sebuah diplomasi bertujuan untuk menciptakan negosiasi dengan menyelesaikan perbedaan dan mengamankan kepentingan negara, sebagai ruang lingkup dengan cara yang tepat dan efektif dalam bernegosiasi. Diplomasi itu sendiri merupakan konsep dimana menempatkan negosiasi ke dalam praktik dengan tujuan tertentu. Diperlukan negosiasi yang efektif untuk mencapai kesuksesan diplomasi. Namun, jika negosiasi cenderung gagal, ada kemungkinan akan berkembang menjadi konflik atau perang dimana ini bisa menjadi ancaman tersendiri bagi negara tersebut, dan ini juga merupakan sarana diplomasi. Prinsip historis mendasar dari realisme klasik yaitu jalinan internasional tidak dapat terlepas dari penglihatan politik domestik. Akibatnya, proses politik internasional bisa menjadi anarki. Identifikasi utama dari perspektif ini adalah pertarungan melawan 2 skema yang ada: pertarungan dan diplomasi. Hans Morgenthau berpendapat, penerapan politik luar negeri nasional oleh para diplomat dirancang sebagai taktik kepemimpinan militer untuk kekuatan dunia, strategi militer dan kebijakan perang nasional. Bagi Morgenthau, diplomasi bukanlah dasar dari hubungan internasional. Inilah yang dimiliki aktor untuk melindungi kedaulatannya dari ancaman. Padahal, diplomasi di sini hanyalah sebuah teknik. Sebab, pada dasarnya untuk menelaah politik sangat dekat kaitannya dengan 'kepentingan yang ditentukan oleh kekuasaan. Ada 3 cara utama dalam menjalankan sebuah diplomasi nasional: adaptasi, kerjasama dan konflik Diplomasi melibatkan lima aspek yang berbeda tetapi penting: kebijakan luar negeri, negosiasi, mekanisme negosiasi, interpretasi pengalaman negosiator, dan tujuan negosiasi. Diplomasi secara umum dibagi menjadi dua bagian (Sundari et al., 2021); (1) Soft diplomacy, merupakan sebuah diplomasi yang dijalankan melalui bentuk

penyelesaian damai di bidang persahabatan, ekonomi, juga bahasa. Metode ini telah teruji nilainya karena banyak negara memilih untuk memahami budaya asing.

(2) Hard Diplomasi, yaitu diplomasi yang dilaksanakan dengan cara menunjukkan kekuatan militer melalui pergerakan militer, atau dengan cara yang lebih keras yaitu “perang”. Djaelantik, diplomasi memiliki pola-pola yaitu (Sundari et al., 2021);

1. *Diplomasi bilateral* didefinisikan jalinan dua arah ketika membahas kepentingan nasional. Secara umum, ada prinsip timbal balik dalam diplomasi ini, sehingga ketika dalam sebuah negara memerlukan pertolongan, negara lain akan memberikan apa yang dibutuhkannya. Namun, terkadang terjadi ketidakseimbangan kekuatan ketika terjadi ketidakseimbangan antara yang kuat dan yang lemah dalam melakukannya.
2. *Diplomasi multilateral*, Artinya, hubungan banyak negara dengan kepentingan dan tujuan yang sama. Biasanya diplomasi ini dilakukan melalui negosiasi terbuka untuk mendapatkan keyakinan yang kuat dari masyarakat internasional. Kelebihan lainnya dalam sebuah diplomasi multilateral adalah kemampuan untuk membuat sebuah keputusan dengan legitimasi kuat saat melibatkan banyak negara.
3. *Personal diplomacy*, yaitu diplomasi. Misalnya, seorang presiden mengunjungi tempat lain dalam hal ini negara untuk menyelesaikan masalah negara dan pribadi saat bertindak sebagai utusan dan lembaga politik, tetapi pikirannya bisa mempengaruhi naluri pribadi negara tersebut. mengunjungi.
4. Diplomasi KTT adalah bentuk diplomasi konferensi yang digunakan dalam pemerintahan global di mana para pemimpin bertemu dan bernegosiasi secara langsung. Misalnya, adanya negara berdaulat dan kekuasaan untuk membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Diplomasi ini umumnya menjadi diplomasi lanjutan ke jenjang yang jauh lebih dalam.
5. *Union diplomacy*, yaitu diplomasi, dilakukan karena kepentingan bangsa-bangsa sama dengan kepentingan yang telah mereka buat dalam diplomasi bersama.
6. Diplomasi konferensi dapat diartikan sebagai diplomasi di mana para pemangku kepentingan berkumpul untuk membahas masalah dan mencari solusi untuk menyelesaikan konflik atau kesenjangan dan mencapai kesepakatan. Pola ini menekankan pada komunikasi lisan atau tatap muka. Hasil diplomasi konferensi hanya akan efektif jika tercapai konsensus.

Diplomasi *First Track* McDonald dan Diamond, Diplomasi jalur pertama adalah diplomasi yang digunakan oleh pemerintah di seluruh dunia. Diplomasi ini dilakukan langsung oleh kepala negara dengan menggunakan protokol yang ditandatangani oleh masing-masing penandatanganan. Diplomasi di arah pertama adalah alat penjaga perdamaian utama dalam kebijakan luar negeri nasional. Diplomasi digunakan oleh diplomat, pejabat pemerintah dan kepala negara. Diplomasi ini digunakan ketika satu negara sedang berkonflik dengan negara lain, dan juga digunakan untuk meningkatkan hubungan antar negara dalam urusan luar negeri. Dalam diplomasi jenis ini digunakan untuk perwujudan perdamaian melalui diplomasi atau kerja sama antar pemerintah. Diplomasi jenis ini digunakan untuk membuat kebijakan dan pembangunan perdamaian dengan cara diplomasi resmi dengan aspek-aspek pemerintah.

Diplomasi ini memiliki kerangka kerja bahwa level pemerintah mampu menciptakan atau membangun kepercayaan, kenyamanan, dan kesepahaman antar negara melalui negosiasi, mediasi, koersi, krisis intervensi, dan resolusi konflik untuk mencegah terjadinya sebuah perang antar negara. Dalam diplomasi ini juga digunakan *power* untuk mempengaruhi orang lain agar mampu mengikuti apa yang ingin dicapai, dan juga membentuk system internasional. Diplomasi ini juga memungkinkan adanya *exercise of power* negara yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan juga mempengaruhi jalannya negosiasi. Diplomasi pada arah pertama secara formal menggunakan diplomasi, yang erat kaitannya dengan kepentingan nasional dan sarat dengan politik. Dalam diplomasi ini, negara-negara akan berusaha untuk melindungi dan memprioritaskan kepentingan nasionalnya. Dalam diplomasi ini, perwakilan negara dapat berbicara tentang apa saja hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan bukan kepentingan individu. Dalam diplomasi ini, tidak diperbolehkan mengatakan apa-apa selain membela kepentingan nasional dan mencapai tujuan perdamaian nasional dan dunia sehingga seorang yang diutus oleh sebuah negara dalam proses ini harus betul-betul dipilah dan dipilih karena pada diplomasi merupakan hal yang krusial bagi sebuah negara. Diplomasi tersebut banyak bentuknya, seperti negosiasi berdasarkan kesepakatan, kesepakatan, dan rencana kerjasama di bidang perdagangan. Diplomasi yang dapat dilakukan dapat berupa diplomasi sipil multilateral antara kedua belah pihak, dan diplomasi untuk mencegah terjadinya konflik yang menyebabkan perang, menyelesaikan konflik, dan menyelesaikan perang (Diamond, 1996).

Track Two Diplomacy Jalur kedua, atau organisasi non-pemerintah, dapat menjadi aktor dalam hubungan internasional yang bekerja untuk menyelesaikan konflik di dunia dan membangun perdamaian. Keterlibatan organisasi non-pemerintah dalam berbagai forum internasional atau memberikan bantuan kemanusiaan, dan dampaknya sangat bermanfaat bagi dalam menciptakan kedamaian dan solusi saat konflik sehingga dapat meredam apabila terjadi konflik yang berkepanjangan. Dalam hal ini memiliki arah tujuan menggunakan cara kedua tidak berbeda dengan cara pertama atau pemerintahan, yaitu pemecahan masalah (*conflict resolution*). Namun perlu ditegaskan bahwa cara penggunaannya juga penerapannya jelas berbeda jauh dengan yang pertama. Jika pemerintah Anda menggunakan sebuah metode formal dengan kode etik yang jelas, lihat dua kegunaan ini. Ini mempromosikan saling pengertian dan kolaborasi juga sinergi dalam membangun komunikasi informal dan bersama-sama memecahkan masalah. Ada anggapan bahwa lahirnya track kedua disebabkan oleh ketidakmampuan track pertama untuk menyelesaikan konflik yang muncul. Oleh karena itu,

upaya selalu dituntut untuk menggunakan prosedur formal daripada dilakukan oleh negara. Jadi lagu kedua adalah gaya yang lebih informal yang membahas masalah yang ada. Diyakini bahwa partisipasi kelompok ini memberi mereka akses ke akar penyebab dari setiap konflik yang muncul, dan memungkinkan setiap pihak yang berkonflik untuk memutuskan apa yang mereka inginkan. Ini tidak hanya memprediksi masalah yang tidak terlihat dalam format formal trek pertama, tetapi juga memudahkan untuk menemukan solusi terbaik. Lagu kedua memiliki budaya yang berkaitan dengan karya yang dilakukan oleh para aktor. Kebanyakan dari mereka milik kelompok khusus dengan sistem. Siapa yang mengatur tugas, dan semua tugas yang dikandungnya tertata rapi (Mujiono & Alexandra, 2019).

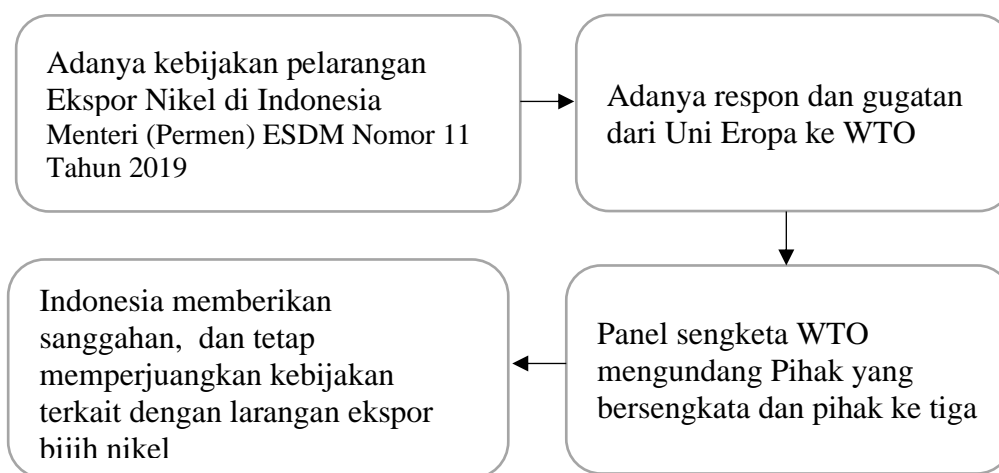
Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang didefinisikan sebagai alat, teknik, dan strategi penelitian yang membantu penulis mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis data literal. Elvinaro (Ardianto, 2014) menerangkan bahwa metode penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan penelitian kualitatif. Dalam metode penelitian ini seorang penulis atau peneliti haruslah berada jauh juga menjaga jarak dengan masalah yang menjadi objek penelitiannya. Lamont dan Bodushinzki menyatakan bahwa peneliti kualitatif menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan penalaran induktif karena cenderung membangun proposisi teoritis berdasarkan pengamatan empiris (Astuti, 2020).biasanya seorang peneliti justru memiliki sudut pandang sebagai instrumen kunci. Studi kualitatif dapat memberikan penjelasan yang detail (deskripsi yang tebal). Dalam penulisannya peneliti mengaplikasikan penerapan deskriptif kualitatif, yang biasa disebut sebagai penelitian taksonomik dimana dalam prosesnya meninjau dan melihat lebih dalam juga mengklarifikasi fenomena yang ada dimasyarakat atau dalam sebuah lingkungan tertentu. Metode pengumpulan data dalam artikel ini didasarkan pada *internet-based research*. Data yang terkumpul disajikan dan dituliskan dalam bentuk berita acara dan siaran pers instansi atau lembaga yang tergolong data primer. Kemudian data berita dari media yang terbit, artikel dan jurnal ilmiah yang sudah dipublikasikan sebagai data sekunder. Proses analisis yang lebih dalam pada artikel yang ditulis ini, dan pada penelitian ini juga menggunakan teori fenomenologi dimana prinsip dasar dari fenomenologi Stanley Deetz yaitu pengetahuan ditemukan langsung dalam pengalaman sadar, kekuatan hal-hal dalam hidup seseorang dapat memiliki makna dalam hidup seseorang, dan bahasa adalah penghubung makna (Ruliana & Lestari, 2019). Berkaitan dengan pemaparan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk

dapat mendiskripsikan bagaimana proses komunikasi diplomasi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi gugatan Uni Eropa ke WTO.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Upaya Komunikasi Diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap gugatan uni eropa menggunakan metode diplomasi 2 jalur atau *track two diplomacy*. Berikut adalah skema gambaran diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi masalah terkait gugatan WTO itu sendiri..



Gambar 1. Dua Jalur Proses Komunikasi Diplomasi dalam Konflik Larangan Ekspor Bijih Nikel

Nikel menjadi salah satu komoditi yang sangat populer di dunia dan digadang-gadang menjadi komoditi sangat strategis di dunia industri otomotif dimasa yang akan mendatang terutama industri yang banyak memanfaatkan tenaga listrik. Nikel menjadi salah satu sumber daya alam yang memiliki daya simpan energi yang baik dan dapat dikombinasikan dengan tenaga cahaya matahari. Persoalan ekspor maupun import menjadi salah satu bentuk perdagangan internasional harus benar-benar dikawal agar seimbang (Alamri, 2017). Dengan adanya kebijakan larangan ekspor bijih nikel di Indonesia membuat Uni Eropa melayangkan gugatannya ke WTO. Berdasarkan gugatan tersebut, Indonesia sama sekali tidak gentar ataupun mundur dibuatnya.

Proses menghadapi dan menyelesaikan gugatan Uni Eropa ke WTO, pada hal ini telah ditempuh 2 jalur diplomasi dan dilakukan komunikasi Internasional yang *idealistic-humanistic approach*. Yaitu yang *pertama*, Pemerintah menjadi peran utama yang membuat perdamaian dengan cara diplomasi. Tingkat diplomatik dilakukan oleh pemerintah Indonesia hal ini terlihat saat menanggapi isu yang terjadi dan berkembang. Hal Ini karena pada realitanya membutuhkan sebuah dorongan kekuatan yang sangat kuat, terutama dalam politik

tingkat tinggi dan memiliki resiko yang besar bahkan dapat menyebabkan atau munculnya sebuah konflik sehingga memicu perang. Asumsi awal dari sebuah siasat dalam radius internasional adalah *relative power* yang memiliki arti Politik dalam suatu negara (Indonesia) harus mampu mengendalikan, memberikan tekanan bahkan mempengaruhi negara lain (Sundari et al., 2021). Diplomasi Indonesia dalam menghadapi gugatan Uni Eropa ke WTO yaitu:

1. Indonesia tidak diperkenankan kembali untuk melakukan ekspor bahan mentah bijih nikel itu sendiri. Semua harus yang diekspor harus dalam bentuk barang setengah jadi ataupun barang jadi (Rachmayanti, 2021).
2. Pada pertemuan KTT G20 yang telah dilaksanakan di indoensia, Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia sangat terbuka keada Negara lain terkait dengan nikel itu sendiri, namun dengan syarat jika Eropa memerlukan bahan nikel dari Indonesia, agar pihak terkait untuk membangun terlebih dahulu industrinya di Indonesia (Cantika Adinda Putri, 2021).
3. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel sendiri dimaksudkan untuk melindungi masa yang akan mendatang terhadap sumber daya alam Indonesia sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Terutama nikel ini merupakan sumber daya alam yang terbarukan sehingga perlu digunakan/dimanfaatkan secara bijak agar memiliki berdampak positif bagi Indonesia.
4. Indonesia juga telah menyiapkan kontra-argumen atas keluhan UE, melalui Kementerian Perdagangan dan Industri, menjelaskan kepada mereka mengapa kebijakan tersebut dibenarkan berdasarkan aturan WTO, sejalan dengan mengapa WTO didirikan pada tahun 1995 (Cantika Adinda Putri, 2021).

Jalur kedua terjadi karena jalur kedua menawarkan peluang yang sangat luas bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam upaya perdamaian. Dalam upaya penyelesaian konflik, lembaga *non-government* dan para ahli juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang damai. Dari segi upaya yang mereka lakukan, ini adalah hubungan preventif, permisif dan suportif antar negara yang dilakukan oleh sekelompok aktor non-negara (Mujiono & Alexandra, 2019). Berdasarkan gambar 1, tentunya peran WTO dalam mendamaikan konflik terkait ekspor bijih nikel memiliki peranan yang sangat sentral dan berpengaruh besar. Dalam jalur ke dua, WTO membantu dalam penyelesaian konflik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Situs resmi *World Trade Organization* menyebutkan tugas pokok dan fungsi WTO, yaitu:

1. Mengelola perjanjian perdagangan internasional
2. Sebagai forum yang digunakan sebagai wadah negosiasi perdagangan internasional
3. Penanganan konflik dalam perdagangan internasional
4. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan perdagangan nasional
5. Memfasilitasi dalam hal bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang

6. Menjalin kerja sama dengan IMF dan Bank Dunia atau organisasi internasional lainnya. (kompas.com, 2020)

Dalam melebarkan sebuah komunikasi yang berskala internasional tidak hanya pada aspek pertengahan saja melainkan dapat terlihat juga dari sudut efek pesan yang disampaikan “*International communication as a field of study recognises not only the media and technologies through which impulses pass, but also the attitudes and social circumstances of the sources, the predisposition of receivers, as well as the effect and impact of the contents*” (Komunikasi internasional sebagai sebuah bidang studi yang diakui bukan hanya media dan teknologinya saja yang terus berkembang, melainkan juga sikap dan keadaan sosial dari sumber, kecenderungan penerima, baik efek maupun dampak isinya) (Madikiza & Bornman, 2007). Adapun peran WTO untuk Negara yang masih Berkembang, adalah: Pertama, menjadi sebuah alat aturan multilateral yang mengontrol operasi perdagangan juga jalur komunikasi internasional yang jelas yang dilakukan oleh pemerintah. Kedua, menjadi forum (fasilitator) negosiasi, komunikasi dan perdagangan. Ketiga, menjadi badan “pengadilan” internasional tempat para civitas dari WTO itu sendiri membereskan masalah sengketa perdagangan dengan anggota GATT lainnya.

Kesimpulan

Gugatan Uni Eropa ke WTO terkait dengan pemberhentian ekspor bijih nikel hingga saat ini masih belum memiliki keputusan yang pasti, oleh karena itu proses komunikasi yang baik terus dilakukan oleh Indonesia mengingat hal ini berkaitan dengan komunikasi RI dengan negara Uni Eropa, tentunya banyak hal dan pertimbangan yang matang dalam pemberian keputusan. Tidak hanya diam, Indonesia melalui diplomasi nya terus mengupayakan hal terbaiknya melalui berbagai pihak tetap mempertahankan terkait dengan larangan ekspor bijih nikel. Terlihat bahwa pemerintah Indonesia melakukan komunikasi yang memiliki sifat yang *idealistic-humanistic approach*. Hal ini tercermin dalam *soft diplomacy* yang dilakukan tidak hanya bilateral, upaya komunikasi diplomasi secara multilateral terkait dengan ekspor bijih nikel juga sudah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dalam penyelesaian masalah diplomasi yang dilakukan. Tentunya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia tidak semata-merta menutup ekspor bijih nikel, namun yang perlu digaris bawahi adalah Pemerintah Indonesia secara terbuka mendiplomasikan bahwa ekspor nikel dapat dilakukan namun memiliki ketentuan khusus untuk setiap Negara lain yang membutuhkan. Upaya mempertahankan kebijakan tersebut tetap dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna

menambah nilai dari bijih nikel itu sendiri hingga memperbaiki neraca keuangan Indonesia, serta mensejahterakan Masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alamri. (2017). A Conceptual Framework: Dumping and Anti Dumping in the International and Regional Legal Systems. *Global Journal of Politics and Law Research*, 5(1), 26.
- Alfian, & Susanti, R. (2023). Jurnal Economina. *Jurnal Economina*, 2(2), 3–4.
- Ardianto, E. (2014). Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif. In CV. *Simbiosis Rekatama Media*. Simbiosis Rekatama Media.
- Astuti, W. R. D. (2020). Kerja Sama G20 dalam Pemulihan Ekonomi Global dari COVID-19. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(2), 131. <https://doi.org/10.25077/ajis.9.2.131-148.2020>.
- Cantika Adinda Putri. (2021). *Ekspor Nikel Digugat di WTO, Jokowi: Enggak Masalah!* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211124132144-4-294043/ekspor-nikel-digugat-di-wto-jokowi-enggak-masalah>.
- Dewi, F. S. (2022). *RI Digugat karena Stop Ekspor Nikel, Jokowi: Hak Kita Dong!* Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200A220117/9/1489825/ri-digugat%02karena-stop-ekspor-nikel-jokowi%02hak-kita-dong>.
- Diamond, L. (1996). *Multi-track diplomacy : a systems approach to peace / Louise Diamond, John McDonald*. Kumarian Press. <https://lib.ui.ac.id>.
- kompas.com. (2020). *WTO: Sejarah, Tujuan, Fungsi dan Struktur*.
- Madikiza, L., & Bornman, E. (2007). International communication: Shifting paradigms, theories and foci of interest. *Communicatio*, 33(2), 11–44. <https://doi.org/10.1080/02500160701685391>.
- Malik, D. D. (2017). Pendekatan Komunikasi Internasional. *Jurnal Common*, 1(2). <https://doi.org/10.34010/common.v1i2.574>.
- Maulana, H. (1997). *Global Information and World Communication*. London_Thousand Oak and New Delhi. *Sage PublicationPublication*.
- Maulana, M. T. (2020). *Gugatan Uni Eropa Terhadap Larangan Ekspor Konsentrat Nikel Oleh Indonesia Di Wto*. Indonesia for Global Justice. <https://igj.or.id/gugatan-uni-eropa-terhadap-larangan-ekspor-konsentrat-nikel-oleh-indonesia-di-wto/>.
- Morissan. (2007). *Manajemen Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional*. Kencana.
- Mujiono, D. I., & Alexandra, S. (2019). *Multi Track Diplomacy: Teori Dan Studi Kasus*. Mulawarman University Press. [https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/5247/Multy Track Diplomacy.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/5247/Multy%20Track%20Diplomacy.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Nugroho, A. S. (2022). Pembatasan Sebagai Solusi Pelarangan Ekspor Bahan Baku Nikel: Studi Kasus Ekspor Bahan Baku Nikel Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(1), 98–113. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1563>.
- Permana, R. (2020). Komunikasi Internasional Oleh Pemerintah Indonesia Sebagai Official Transaction Dalam Menghadapi Asian Community 2015 (Ditinjau Dari Perspektif Diplomatik). *Comicos: Bringin the Gap, 2015*, 306–316.
- Irwandy, Arif. (2018). *Buku nikel Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmayanti, S. (2021). *5 Fakta RI Stop Ekspor Bahan Mentah, Jokowi Tantang Uni Eropa Bawa Pabrik Nikel*. <https://economy.okezone.com/read/2021/11/27/320/2508309/5-fakta-ri-stop-ekspor-bahan-mentah-jokowi-tantang-uni-eropa-bawa-pabrik-nikel>.
- Ruliana, P., & Lestari, P. (2019). Teori Komunikasi. In *Salemba Humanika* (9th ed.). Salemba Humanika.

- Saefudin, H. A. (2008). dalam Membangun Citra Indonesia : Studi Kegiatan “ Koalisi untuk Kebebasan Informasi .” *MediaTor E-Jurnal Unisba*, 9(1), 77–88. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/download/1137/703>.
- Sari, L. A., & Sugito. (2022). Impact of Indonesia’s nickel ore export prohibition policy on Indonesia-European Union’s political relations Article Info ABSTRACT. *JISoP*, 140(2), 140–148. <https://doi.org/10.33474/jisop.v4i2.16650>.
- Silaban, W. M. (2021). *Pemerintah Targetkan Investasi USD 21,28 M dari Peningkatan Nilai Tambah Mineral*. <https://bisnis.tempo.co/read/1532470/pemerintah-targetkan-investasi-usd-2128-m-dari-peningkatan-nilai-tambah-mineral/full&view=ok>.
- Sundari, R., Prayuda, R., & Venita Sary, D. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar. *Jurnal Niara*, 14(1), 177–187. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.6011>.
- Tui, R. N. S., & Adachi, T. (2021). An input - output approach in analyzing Indonesia’s mineral export policy. *Mineral Economics*, 34(1), 105–112. <https://doi.org/10.1007/s13563-020-00226-3>.
- Wahyu, L. C. R., & Siahaan, C. (2021). Peran Penting Komunikasi Internasional Dalam hubungan masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 1(2), 99.